

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari beberapa pembahasan dari temuan-temuan yang telah disajikan pada bagian terdahulu, peneliti memberi kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pesantren memiliki banyak kekurangan yang mendukung berjalannya sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) pesantren. Pesantren tidak memiliki dokumen *quality assurance*, terutama sekali dokumen standar mutu yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren. Dokumen standar mutu pesantren mencakup standar mutu kompetensi lulusan pesantren, standar mutu proses pembelajaran pesantren, standar mutu sumber daya manusia pesantren, standar mutu manajemen pesantren, dan 2 standar lainnya yaitu standar mutu fungsi dakwah pesantren dan standar mutu pengembangan masyarakat pesantren. Ketiadaan standar ini disebabkan pesantren belum memiliki lembaga penjaminan mutu yang punya kewenangan dan tugas dalam mengembangkan standar mutu. Ketiadaan standar mutu, tentu berdampak pada pelaksanaan capaian mutu. Ketiadaan standar mutu berdampak pula pada penyiapan dokumen-dokumen pedoman mutu yang menjadi acuan teknis bagi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik. Pedoman-pedoman ini yang memberi instruksi pelaksanaan berbagai aktivitas kegiatan pesantren dalam mencapai tujuan. Peran yang tidak maksimal atau ketiadaan

lembaga penjaminan mutu pada pesantren membuat agenda penjaminan mutu pesantren tidak berjalan secara maksimal. Meskipun terjadi dan berjalan prinsip manajemen penyelenggaraan pesantren sebagai suatu hal yang mesti dilaksanakan oleh pengelola pesantren, tetapi aspek mutu menjadi tidak dapat dijamin proses dan hasilnya berhubung mekanisme penjaminan mutu yang telah disebutkan di atas tidak dapat berjalan secara efektif.

2. Beberapa hal yang menjadi problem tersebut menjadi dasar dan landasan berpikir dalam pengembangan model penjaminan mutu (*quality assurance*) dalam bentuk instrumen standar mutu dan implementasinya yang sesuai dengan kebutuhan pondok pesantren di Kalimantan Timur. Perumusan/pengembangan standar mutu pesantren sebagai bagian penting dalam siklus sistem penjaminan mutu merujuk kepada konsep kepesantrenan secara teoritis dan regulasi perundang-undangan serta keadaan riil dan potensial pesantren sesuai kebutuhan pesantren. Standar-standar yang dihasilkan merupakan hasil diskusi dengan pakar dan pengelola pesantren terkait 6 aspek mutu pesantren yaitu standar mutu lulusan dengan 13 pernyataan standar dan 43 indikator, standar mutu proses pembelajaran dengan 55 pernyataan standar dan 151 indikator, standar sumber daya manusia pesantren dengan 21 pernyataan standar dan 85 indikator, standar manajemen dengan 77 pernyataan standar dan 296 indikator standar fungsi dakwah pesantren dengan 6 pernyataan standar dan 33 indikator, dan standar

fungsi pengembangan masyarakat pesantren dengan 4 pernyataan standar dan 25 indikator.

3. Model instrumen penjaminan mutu (*quality assurance*) yang telah dirumuskan, diujicobakan secara terbatas dan luas pada pondok pesantren sasaran dengan cara sosialisasi dan implementasi model untuk memberikan suatu dampak atau implikasi keberadaan model melalui penilaian persepsional pengelola pondok pesantren. Dari hasil ujicoba terbatas diperoleh data bahwa persepsi ujicoba terbatas pada aspek format umum naskah adalah baik, sedangkan pada aspek substansi naskah dan implementasi model memiliki persepsi baik. Untuk ujicoba luas pada aspek format umum naskah, persepsi responden adalah baik, sedangkan pada aspek substansi naskah dan implementasi, responden memiliki persepsi baik. Ini memberikan gambaran bahwa naskah produk yang telah dirumuskan oleh peneliti, dalam pandangan para pengelola pesantren memiliki suatu implikasi yang baik dan efektif bagi penyelenggaraan pesantren. Dengan memiliki naskah model instrumen penjaminan mutu, pesantren dapat menerapkan langkah-langkah terukur dan sistematis terkait dengan butir-butir indikator yang ada dalam standar mutu yaitu standar mutu lulusan pesantren, standar proses pembelajaran pesantren, standar sumber daya manusia pesantren, standar manajemen pesantren, standar fungsi dakwah pesantren dan standar fungsi pengembangan masyarakat pesantren. Enam standar mutu yang ada dalam naskah sistem penjaminan mutu pesantren yang telah dirumuskan, sesuai dengan persepsi pengelola pesantren memiliki nilai-nilai substansial

yang sangat relevan dengan mutu pengembangan pesantren. Hal ini terlihat pada aspek persepsi pengelola yang memandang bahwa instrumen standar penjaminan mutu (*quality assurance*) mudah dipahami, jelas dipahami, cakupan mutu luas, penjabaran yang luas, isi naskah yang dalam, realisasi yang mudah, waktu yang cukup untuk direalisasikan, isi naskah yang bermanfaat, pencapaian standar yang mudah dan standar mutu yang realistis untuk diwujudkan dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren.

## **B. Saran/rekomendasi**

Dari beberapa pembahasan dari temuan-temuan yang telah disajikan pada bagian terdahulu, peneliti memberi rekomendasi penelitian sebagai berikut sebagai berikut ;

1. Dengan adanya temuan bahwa sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) yang belum terbentuk dan berjalan di pesantren, maka pihak pengelola pondok pesantren perlu melakukan inisiasi membangun sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) dengan melakukan langkah-langkah konkret berupa pembentukan unit penjaminan mutu dengan sumber daya manusia yang memadai dan kompeten baik sebagai konseptor *quality assurance* maupun pelaksana teknis penjaminan mutu internal. Dengan adanya unit penjaminan mutu internal ini, maka tahapan atau langkah-langkah siklus mutu berupa penetapan (perumusan dokumen mutu), pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian serta perbaikan mutu akan dapat berjalan secara efektif.
2. Sebagai langkah awal yang penting bagi penjaminan mutu, hal yang penting dilakukan adalah pengembangan standar pondok pesantren. Hasil penelitian

ini merupakan produk yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan dapat dimodifikasi oleh pesantren dengan menyesuaikan hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil pesantren. Pihak pesantren perlu melakukan pengembangan standar yang lebih detail dari 6 (enam) standar yang telah dirumuskan yang sesuai dengan kondisi pesantren.

3. Berhubung penelitian ini hanya fokus pada pengembangan standar mutu pesantren dan implementasi sebagai bagian dari *quality assurance*, maka diperlukan penelitian dan pengembangan lanjutan yang dapat dilakukan oleh peneliti berikutnya. Penelitian dan pengembangan lanjutan diperlukan untuk menghasilkan produk yang relevan dengan 6 (enam) standar mutu pesantren, seperti manual atau pedoman-pedoman akademik maupun non akademik pondok pesantren, *standard operating procedure* (SOP) pesantren, dan sistem monitoring evaluasi (monev).
4. Pihak pesantren perlu bersinergi dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) pesantren seperti Kantor Kementerian Agama Pusat pada bidang kepesantrenan, Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota maupun perguruan tinggi untuk pengembangan dan penguatan sistem penjaminan mutu (*quality assurance*) pesantren. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dikelola secara swadaya, pesantren senantiasa memerlukan asistensi dan pendampingan dari institusi terkait sehingga pesantren dapat diberdayakan secara maksimal dan dapat tetap eksis dalam menyelenggarakan pendidikan keislaman.